



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI
DENGAN PLT. DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI DAN
DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (PERSERO)**

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM RI dan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 18 Januari 2018
Waktu	: Pukul 11.00WIB s.d 18.15 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I
Ketua Rapat	: Ir. H. S.W. Yudha, M.Sc, ME (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: ...Orang dari 50 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI : ...Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin
Hadir Pemeritah	: Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM RI dan Direktur Utama PT.Pertamina (Persero)
Acara	: 1. Kebijakan Pemerintah Tidak Ada Kenaikan BBM Tahun 2018 Dan Pengaruhnya Terhadap Keuangan dan Operasional. 2. Penjelasan Terkait Kelangkaan LPG 3 Kg. 3. Perkembangan Sektor Hulu Migas. 4. Dan lain-lain.

KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018 dibuka pukul 11.20 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ir. H. S.W. Yudha, M.Sc, ME., dan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Kebijakan Pemerintah Tidak Ada Kenaikan BBM Tahun 2018 Dan Pengaruhnya Terhadap Keuangan dan Operasional.

- b. Penjelasan terkait Kelangkaan LPG 3 Kg.
- c. Perkembangan Sektor Hulu Migas.
- d. Dan lain-lain.

II. KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

1. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM RI atas kebijakan yang tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sampai triwulan pertama 2018 dengan memperhatikan kemampuan keuangan PT Pertamina (Persero) agar tetap sehat secara *financial* dan dapat meningkatkan investasinya. Selanjutnya Komisi VII DPR RI mendesak Pemerintah melalui Plt. Dirjen Migas untuk membuat kebijakan fiskal yang tidak merugikan PT Pertamina.
2. Komisi VII DPR RI sepakat dengan PT Pertamina (Persero) bahwa PT Pertamina (Persero) akan membuat simulasi sensitifitas harga BBM dengan menggunakan *formula* harga minyak mentah dunia agar dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan kebijakan harga BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan BBM Penugasan yang tidak membebani rakyat, tetapi juga tidak merugikan PT Pertamina (Persero).
3. Komisi VII DPR RI sepakat dengan PLT Dirjen Migas dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk menjaga ketersediaan stok LPG dan distribusi yang efektif agar tidak terjadi kelangkaan LPG 3 kg di masyarakat. Apabila terjadi kelangkaan dan telah melampaui kuota yang ditetapkan dalam APBN maka Pertamina dapat menambah kuota dan membebaskan kepada Pemerintah.
4. Komisi VII DPR RI sepakat dengan PLT Dirjen Migas dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk melakukan kajian pola distribusi LPG 3 kg bersubsidi baik yang bersifat tertutup maupun subsidi langsung yang diterima oleh kelompok masyarakat tertentu penerima subsidi, dan membentuk tim pengawasan bersama Komisi VII DPR RI terhadap pelaksanaan distribusi dan pencegahan penyalahgunaan penyaluran.

5. Komisi VII DPR RI sepakat dengan PLT Dirjen Migas untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan manfaat penugasan distribusi BBM kepada Pihak Swasta dan melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 30 Januari 2018.

III. PENUTUP

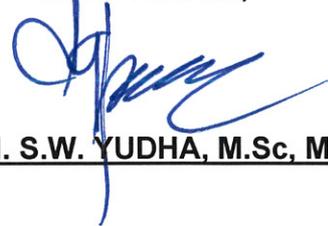
Rapat ditutup 18.15 WIB

**Plt. DIRJEN MIGAS
KEMENTERIAN ESDM RI**



EGO SYAHRIAL

Jakarta, 18 Januari 2018
KETUA RAPAT,



Ir. H. S.W. YUDHA, M.Sc, ME

**DIREKTUR UTAMA
PT PERTAMINA (PERSERO)**



ELIA MASSA MANIK